

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Proses berkembangnya suatu negara khususnya pada bidang ekonomi tidak hanya ditandai dengan meningkatnya aspek-aspek perekonomian saja, melainkan juga harus diikuti dengan adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia di negara tersebut. Sumberdaya manusia yang berkualitas tentunya akan memberikan stimulus terhadap peningkatan perekonomian pada suatu negara.

Perkembangan kualitas sumberdaya manusia di suatu negara juga tidak terlepas dari usaha pembangunan sumberdaya manusia itu sendiri. Pembangunan sumberdaya manusia memiliki andil yang besar didalam bentuk sumberdaya yang berkualitas di suatu negara. Pembangunan tersebut dapat dilihat dari besarnya dana untuk bidang kesehatan, pendidikan, serta upaya pemerintahan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

UNDP (*United Nation Development Programme*) mengartikan pembangunan manusia (*human development*) sebagai sebuah proses ekspansi dari pilihan-pilihan yang dapat dipilih oleh penduduk. Pilihan-pilihan yang dibuat ialah pilihan-pilihan terbaik yang dapat diambil oleh suatu populasi yang merupakan hasil dari pembangunan manusia di wilayah itu sendiri. Pembangunan ialah proses peningkatan kualitas manusia dalam suatu komunitas dengan menggunakan berbagai indikator pendukung. Indikator-idikator tersebut akan menjadi acuan dan perhatian khusus dalam proses pembangunan manusia.

Tahun 1990, UNDP (*United Nation Development Programme*) mengenalkan sebuah indikator yang mampu mewakili perkembangan manusia secara terukur dan representative yang disebut dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di dalam publikasi oleh UNDP melalui *Human Development Report* tahun 1996, pembangunan manusia di definisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choices*” atau proses peningkatan aspek kehidupan masyarakat. Di dalam *Human Development Report* tersebut juga menegaskan bahwa manusia ialah aset berharga bagi sebuah bangsa. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa adanya orientasi terhadap manusia sebagai arti penting dari sebuah pembangunan. Hal ini menekankan bahwa pembangunan manusia pada dasarnya ialah melihat manusia sebagai final goals atau tujuan terakhir serta menjadi input dari sebuah pembangunan (BPS, 2019).

IPM memaparkan seperti apa cara agar penduduk dapat memperoleh output dari pembangunan dalam mendapatkan penghasilan, kesehatan dan pendidikan serta yang lainnya. Karena output yang diperoleh sangat memengaruhi tersalurkannya inti dari pembangunan kepada masyarakat atau tidak. Semakin output dapat tersalurkan dengan merata dan baik, maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas manusia lewat pembangunan manusia.

Ul Haq (2012) menekankan perlunya manusia menjadi inti dari ide pembangunan. Ini mendadakan bahwa mengelola semua sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan guna meningkatkan kemampuan manusia. Garis pemikiran ini konsisten dengan UNDP yang diterjemahkan ke dalam beberapa indikator sosial ekonomi yang mewakili kualitas hidup pada beberapa ukuran

kuantitatif, antara lain: Kapasitas ekonomi, kapasitas pengetahuan dan keterampilan, serta kemampuan untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. (Ranis dalam Yusniah, 2018).

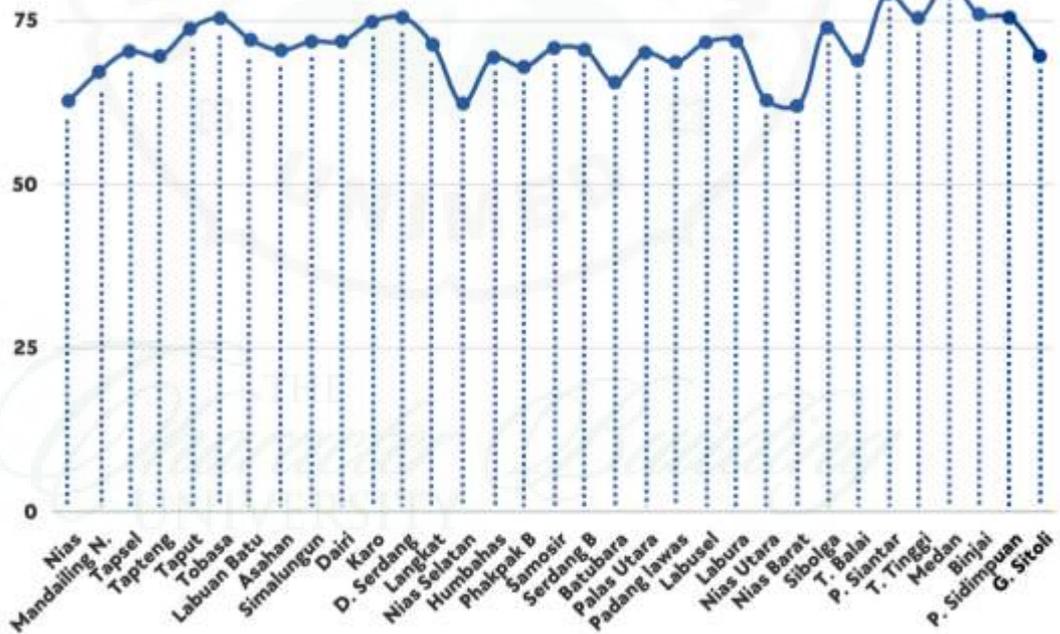
Di bidang ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi dasar penilaian kuantitatif modal manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah indeks komprehensif yang mencirikan tingkat pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah. Indikator ini dimasukkan dalam mengukur kinerja nasional dalam hal kesehatan dan umur panjang penduduk, pendidikan, dan pendapatan riil.. (Gregory Mankiw et al., 1992)

Indeks Pembangunan Manusia menjadi suatu tolak ukur dalam melihat perkembangan dari kualitas manusia pada suatu wilayah. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang berkategori sedang hingga rendah menjadi indikasi bahwa kualitas manusia di suatu negara belum bisa dikatakan baik. Karena indeks ini memberikan gambaran tentang kemampuan manusia di dalam memperoleh tiga hal yakni kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Semakin banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh tiga hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan masih rendahnya kesejahteraan di negara tersebut.

Provinsi Sumatera Utara ialah salah satu provinsi yang terletak dibagian utara pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan dengan luas wilayah sejauh 72.981,23 km<sup>2</sup>. Provinsi Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa

Tengah. Berlandaskan data tahun 2021 penduduk Sumatera Utara berjumlah 15.136.522 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 207,40 jiwa/km<sup>2</sup>. Sumatera Utara memiliki potensi dibidang energi, pertanian, perkebunan dan beberapa sektor seperti pariwisata. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan perekonomian.

Dengan potensi dan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, nyatanya provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IPM yang berkategori tinggi yaitu dengan skor 72. Bila divisualisasikan dalam bentuk grafik IPM di provinsi Sumatera Utara tahun 2021 ialah sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Sumatera Utara tahun 2021**

Berdasarkan data terlihat pada tahun terakhir beberapa dari kab/kota di provinsi Sumatera Utara masih berada pada nilai IPM yang kurang dari 70 (<70). Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa di provinsi Sumatera Utara tergolong sedang. Data tahun 2021 menunjukkan Kota Medan menjadi daerah yang paling tinggi Indeks Pembangunan Manusia nya dengan nilai 81,21 sedangkan yang paling rendah ialah Kab. Nias Barat dengan nilai 61,99. Nilai Indeks Pembangunan Manusia yang berkategori sedang hingga rendah menjadi indikasi bahwa kualitas manusia di suatu daerah belum bisa dikatakan baik. HDI menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini untuk mengategorikan apakah suatu negara ialah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang (UNDP, 1990). Karena indeks ini memberikan gambaran tentang kemampuan manusia di dalam memperoleh tiga hal yakni kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak. Semakin banyaknya masyarakat yang kesulitan dalam memperoleh tiga hal tersebut menunjukkan masih rendahnya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan masih rendahnya kesejahteraan di daerah tersebut.

Kesenjangan antara kota dengan IPM tertinggi di Sumatera Utara dan yang terendah. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor pembentuk IPM yakni pendidikan (pengetahuan), kesehatan dan standar hidup yang layak. Untuk kota Medan jumlah fasilitas pendidikan dirasa lebih banyak sehingga lebih mudah dijangkau aksesnya, berbanding terbalik dengan kab. Nias Barat yang kemungkinan besar fasilitas pendidikannya masih minim sehingga sulit diakses. Selanjutnya dari dimensi kesehatan, Kota Medan memiliki jumlah fasilitas

kesehatan terbanyak diantara kab/kota lainnya di Sumatera Utara. Tak salah bila IPM kota Medan menjadi yang tertinggi, karena mudahnya mendapatkan akses dan bantuan kesehatan, berbanding terbalik dengan Kab. Nias Barat yang menurut data BPS tahun 2020 tidak memiliki rumah sakit umum maupun khusus, dan jumlah layanan kesehatan seperti Klinik/Balai Kesehatan yang dimiliki hanya berjumlah 8. Hal ini menjadi salah satu faktor dari rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di Kab. Nias Barat, sehingga menyebabkan nilai IPM nya juga rendah karena rendahnya angka harapan hidup. Pada dimensi standar hidup yang layak, untuk jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah perusahaan, Kota Medan memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan, dan juga ialah pusat dari perekonomian di Sumatera Utara. Hal ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sehingga pengeluaran untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan primer dapat lebih mudah ditemui dibandingkan dengan Kab. Nias Barat, yang dirasa masih sedikit jumlah lapangan pekerjaan dan investasi pada perusahaan di daerah tersebut.

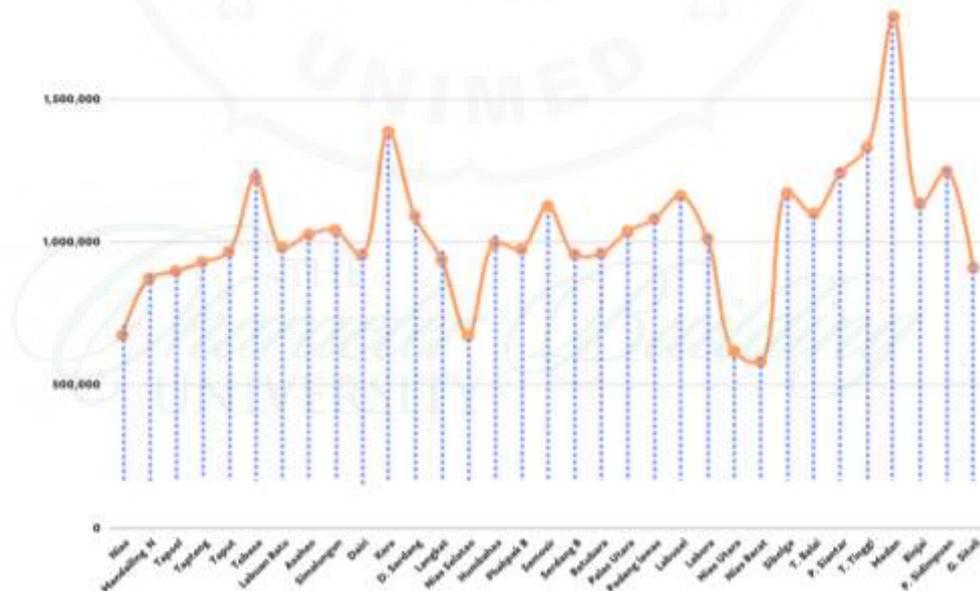
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya dinilai berdasarkan beberapa dimensi. Dimensi-dimensi tersebut meliputi Umur Panjang dan Hidup Sehat, Pendidikan dan Standar Hidup Layak. Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup (*life expectancy*). Untuk pendidikan diukur dengan rata-rata lama sekolah serta standar hidup layak dapat diukur dengan pengeluaran riil perkapita (*Purchasing power parity*). (UNDP, 1990)

Bagian penting dalam memandang pembangunan manusia ialah standar kehidupan yang layak atau daya beli. Daya beli masyarakat ini menunjukkan

tingkat kesejahteraan yang dirasakan penduduk sebagai akibat dari makin baiknya perekonomian. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang bisa terlihat dari rata besaran pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili kesuksesan pembangunan untuk hidup yang layak. (BPS, 2019)

Disi lain kegiatan rumah tangga memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui pengeluaran rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996:Ramirez dkk, 2012: Ranis, 2014).

Berikut ialah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kab/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.2 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021**

Bila melihat grafik dari pengeluaran per kapita pada tahun 2021, masih sangat terlihat bahwa daerah Nias menjadi daerah dengan pengeluaran perkapita terendah dari yang lainnya di provinsi Sumatera Utara. Terendah ialah Nias Barat dengan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan hanya sekitar Rp.580.838 sedangkan bila dibandingkan dengan Kota Medan yang memiliki pengeluaran perkapita tertinggi di Sumatera Utara yakni Rp. 1.788.156 per bulannya, masih terlihat sekali perbedaan yang mencolok serta kesenjangan dari segi pengeluaran di kab/kota di provinsi Sumatera Utara.

Rendahnya pengeluaran perkapita di Nias barat sejalan dengan rendahnya IPM di kab. tersebut. Karena pada dasarnya pengeluaran perkapita dapat memberikan indikasi bahwa beberapa masyarakat masih kesulitan dalam mengeluarkan uang pada setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan kemungkinan besar untuk kesehatan dan pendidikan juga sulit untuk dipenuhi. Rendahnya pengeluaran perkapita di daerah tersebut dipengaruhi oleh masih minimnya investasi di kab. tersebut. Menurut data *National Single Window for Investment* (NSWi) terhitung investasi dalam negeri kab. Nias Barat Januari 2021 hanya sebesar 12 miliar rupiah, berbanding terbalik dengan kota Medan yang angkanya mencapai 5,12 triliun rupiah. Sejalan dengan teori yang berkaitan dengan investasi yakni semakin tinggi investasi maka akan semakin memperluas lapangan pekerjaan. Perluasan lapangan pekerjaan, akan memberikan dampak pada pendapatan sehingga pengeluaran juga akan meningkat.

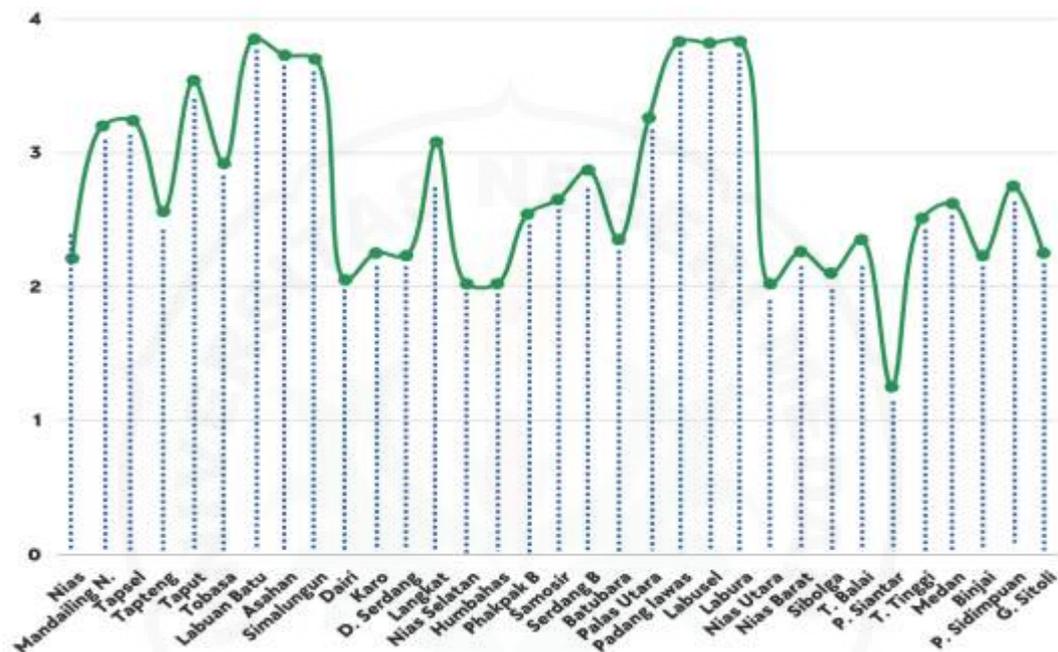
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan IPM

karena kesuksesan dari suatu kegiatan ekonomi tidak terlepas dari campur tangan para pekerja atau sumber daya manusia yang berkualitas. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi memengaruhi pendapatan masyarakat yang kemudian memengaruhi pengeluaran perkapita. Pengaruh dari pengeluaran perkapita ini memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dalam teori Kuznets disebutkan bahwa salah satu ciri dari pertumbuhan ekonomi modern ialah output perkapita yang tinggi. Besarnya pertumbuhan output berakibat pada berubahnya pola konsumsi masyarakat, dalam artian bahwa semakin tingginya pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong output perkapita dan merubah pola konsumsi dan mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. (Kuznets, dalam Pardede)

Menurut Ranis (2014), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung pada peningkatan pembangunan manusia dari peningkatan pendapatan. Pendapatan yang meningkat akan mendorong pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang bergizi serta pendidikan dan kesehatan khususnya pada rumah tangga yang miskin. Diketahui hal ini akan mendorong semakin dapat dipenuhinya kebutuhan seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan yang dapat memberikan pengaruh dan dorongan terhadap pembangunan manusia di suatu daerah. Karena pendidikan dan kesehatan juga menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kemampuan manusia dan membangun manusia di dalam suatu negara.

Berikut ialah perkembangan laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara dalam 10 tahun terakhir tahun terakhir:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021**

Berdasarkan gambar, laju pertumbuhan ekonomi pada setiap kab. kota memiliki beberapa perbedaan. Tahun 2021 Kota Pematang Siantar menjadi daerah di Sumatera Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah yakni hanya sebesar 1,25% per tahun. Sedangkan bila melihat grafik daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 ialah Kab. Padang Lawas dan Kab. Labuhan Batu Utara masing-masing sebesar 3,83% disusul dengan Labuhan Batu Selatan yakni 3,82%. Sedangkan daerah tersibuk di Sumatera Utara yakni Kota Medan laju pertumbuhan ekonominya pada tahun 2021 sebesar 2,62%. Pertumbuhan yang tidak terlalu signifikan ini diakibatkan masih berusaha survive

nya perekonomian selepas adanya badai pandemi covid-19 yang dimulai dari awal tahun 2020 hingga tahun 2021. Beberapa sektor perekonomian mengalami penurunan produktivas, serta beberapa sektor ada yang tidak dapat berjalan dengan semestinya.

Cukup besarnya pertumbuhan ekonomi di Kab. Padang Lawas, diikuti dengan cukup besarnya pendapatan masyarakat dari produksi kelapa sawit di tahun 2021, sedangkan Kab. Labuhan Batu Utara di tahun 2021 terdapat peningkatan dari pendapatan sektor pertanian, kehutanan dan pertanian serta industri pengolahan. Sedangkan Pematang Siantar yang merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi terendah di Sumatera Utara tahun 2021, kemungkinan besar masih sedikitnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke pematangsiantar dikarenakan masih adanya kasus covid-19, pengaruh dari sedikitnya jumlah wisatawan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Pematang Siantar dikarenakan daerah ini dikenal dengan potensi wisatanya.

Bila melihat dari dimensi pembentuk IPM, data pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Utara tidak sejalan dengan data nilai IPM di daerah tersebut. Seperti kota Medan, yang merupakan daerah dengan IPM tertinggi hanya memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 2,62%, sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni Padang Lawas dan Labuhan Batu Utara hanya memiliki nilai IPM sebesar 68,64 dan 71,81. Komparasi dari kedua data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu akan diikuti dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi juga.

Perekonomian dinilai menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kualitas taraf hidup dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan memberikan pengaruh yang positif terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga kemampuan untuk mendorong kualitas manusia dengan pendidikan dan kesehatan dapat lebih mudah dilakukan.

Todaro dan Smith menyatakan bahwa bila tingkat kemiskinan tinggi maka kemampuan manusia untuk mengakses fasilitas pendidikan akan terhambat sehingga kondisi penduduk menjadi terbelakang serta buta huruf. Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam agar produktif tidak tercapai bahkan mungkin terbengkalai (Todaro & Smith dalam Izzah, 2021). Kondisi ini akan berdampak pada rendahnya kualitas manusia sehingga tingkat Indeks Pembangunan Manusia rendah.

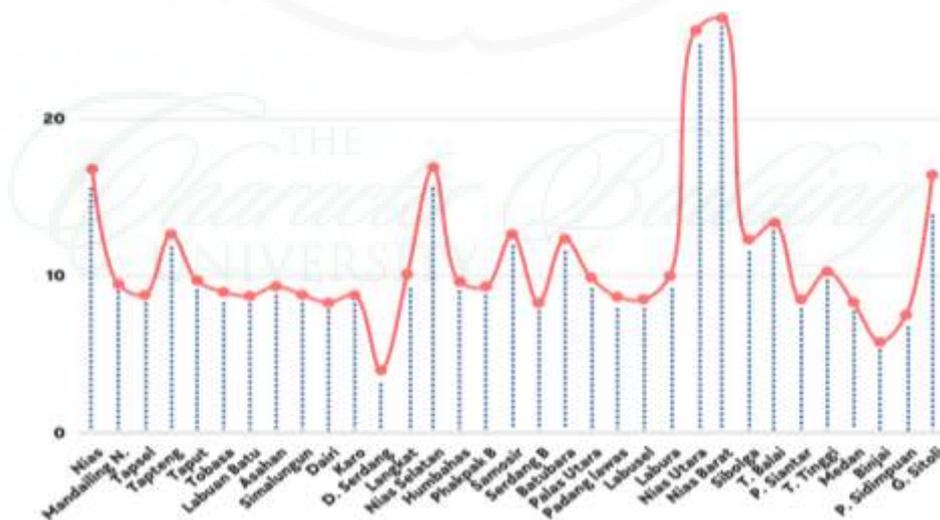
Di sisi lain kemiskinan mampu memberikan pengaruh yang serius kepada pembangunan manusia, disebabkan karena persoalan kemiskinan menjadi sebuah persoalan yang kompleks yang bermula dari ketidakmampuan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya (*basic need*) sehingga kebutuhan yang lain seperti kesehatan dan pendidikan terabaikan. Penduduk dalam kategori miskin tidak mempunyai kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak (Pardede Wiandita, 2021). Persoalan tersebut dapat memicu ketidakberhasilannya pemerintah dalam meningkatkan capaian pembangunan manusia.

Kemiskinan akan mengakibatkan tidak maksimalnya tingkat kemakmuran masyarakat sedangkan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

ialah tujuan akhir dari pembangunan. Bila angka kemiskinan pada sebuah daerah tergolong tinggi maka akan menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi. Pendapatan masyarakat miskin yang rendah menurunkan daya beli, sehingga kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan untuk mendorong peningkatan kualitas manusia juga tidak dapat terpenuhi.

Di kondisi sekarang ini, beberapa negara miskin atau berkembang sedang membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya. Beberapa dari negara dengan penduduk miskin yang jumlahnya banyak kebanyakan memiliki skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Kemiskinan bisa dipengaruhi oleh adanya kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, atau pendidikan dan pekerjaan yang sulit untuk di akses (Bappeda, 2011) maka daripada itu kemiskinan mampu memengaruhi nilai IPM (Chalid & Yusuf, 2014)

Berikut ialah data perkembangan persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik 2022

**Gambar 1.4 Persentase Penduduk Miskin Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021**

Berdasarkan gambar terlihat beberapa daerah di provinsi Sumatera Utara masih memiliki tingkat kemiskinan penduduknya diatas 10% yang menandakan masih banyaknya penduduk di provinsi Sumatera Utara yang masih berada pada garis kemiskinan. Kab. Nias Utara dan Nias Barat menjadi daerah dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan masing-masing 25,66% dan 26,42% sangat jauh berbeda dari kab/kota lainnya. Sedangkan tingkat kemiskinan terendah berada di Kab. Deli Serdang dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,01%. Untuk kota besar yakni kota Medan tingkat kemiskinan berada pada angka 8,34% hal ini kemungkinan besar diakibatkan karena banyak sekali pendatang dari daerah lain untuk merantau ke kota Medan dengan harapan memperoleh hidup yang lebih baik, namun di sisi lain semakin menambah jumlah orang yang berada pada garis kemiskinan. Hal ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sehingga beberapa masyarakat di daerah seperti Nias Barat dan Nias Utara masih berada pada garis kemiskinan.

Bila melakukan perbandingan data IPM dan data Tingkat Kemiskinan tahun 2021, Beberapa daerah di Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi memiliki nilai IPM yang rendah. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa semakin sulinya ekonomi masyarakat dan semakin banyak nya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan memberikan indikasi yakni juga rendahnya kualitas manusia di daerah tersebut.

Kemiskinan yang tinggi memberikan pengaruh yang buruk terhadap pemenuhan kebutuhan manusia baik itu dari kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya. Kesulitan untuk memperoleh kebutuhan primer seperti pangan, memberikan dampak buruk bagi kesehatan, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan sulit untuk dilakukan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah persoalan yang kompleks, yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam kehidupan masyarakat. IPM berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perekonomian serta kemiskinan. Ini ialah suatu topik yang sangat menarik untuk dibahas dengan melihat seberapa jauh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk dari beberapa faktor seperti Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin.

Berdasarkan serangkaian persoalan empiris, teoritis dan fenomena yang dipaparkan, peneliti tertarik untuk membahas serta melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latarbelakang permasalahan yang sudah diuraikan, penulis memaparkan beberapa permasalahan yang sedang terjadi di Sumatera Utara diantaranya:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara yang terus meningkat namun lambat dalam beberapa tahun terakhir serta masih tertinggal dari beberapa provinsi di Indonesia.
2. Masih ditemukan pengeluaran perkapita yang rendah di beberapa kab/kota di Sumatera Utara yang menyebabkan tingginya kesenjangan pengeluaran antar beberapa daerah khususnya daerah Nias dengan beberapa kab/kota lainnya.
3. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun pada tahun 2019-2021 mengalami penurunan yang terjadi dan penurunan terbesar terjadi di tahun 2020 akibat dari pandemi covid-19.
4. Persentase jumlah penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir namun masih tergolong tinggi di angka 8,49 persen.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian menggunakan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Perkapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin.
2. Data untuk variabel penelitian hanya diambil dari kab/kota di Provinsi Sumatera Utara.
3. Data yang dipakai ialah data tahunan dalam kurun waktu 2017-2021.

#### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang serta pemaparan yang dilakukan sebelumnya, maka masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
3. Apakah ada pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?
4. Apakah ada pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian yang diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran yang bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan pengaruh Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin terhadap IPM di provinsi Sumatera Utara serta dapat menjadi rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia dan kaitannya dengan perekonomian di Sumatera Utara dan menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis dalam menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam menulis serta menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.